

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah usaha peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk selanjutnya peneliti akan menjadikan penelitian tersebut sebagai bagian dari referensi ataupun acuan juga untuk mengembangkan suatu penelitian. Pada bagian ini, peneliti menulis judul dan nama penulis, sebagai sumber darimana penelitian itu didapatkan, yang kedua adalah hasil penelitian, pada hasil penelitian ini peneliti akan melihat sejauh mana penelitian ini mengungkap suatu pertanyaan penelitian serta menjelaskan hasil-hasilnya, dan yang terakhir adalah relevansi, dalam relevansi dibahas tentang hubungan atau kaitan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan juga penelitian terdahulu. Yang mana dari persamaan tersebut akan dihasilkan sebuah perbandingan, acuan pengembangan penelitian juga. Maka dari itu berikut adalah 5 penelitian terdahulu yang akan dibahas oleh peneliti :

1) Judul dan Penulis :

Asih Ulum Sari, 2021, “Evaluasi Pelatihan dengan Model Evaluasi Kirpatrick di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita(BPRSW) Yogyakarta”

Hasil Penelitian :

Pada penelitian ini menghasilkan 3 hal yaitu yang pertama reaksi kepuasan peserta terhadap materi yang diajarkan, fasilitas yang tersedia, jadwal, kualitas, makanan, kedua evaluasi pembelajaran atau belajar dimana didalam evaluasi ini melihat bagaimana sesudah mengikuti keterampilan, dan yang terakhir adalah evaluasi perilaku, dimana dalam evaluasi ini untuk mengetahui perubahan perilaku didalamnya. Yang hasilnya peserta pelatihan ada yang telah puas dengan pelayanan di BPRSW karena biaya hidup yang yang ditanggung, pemberian skill serta mendapatkan sertifikasi yang membantu mereka nantinya dalam membuka usaha .Evaluasi ini memperbaiki pandangan tentang indicator keberhasilan program-program yang sudah diimplentasikan, karena selama ini evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga hanya berupa evaluasi patriwulan dalam bentuk rapat yang diketik berisi kritikan, masukan, keluhan dari para instruktur kepada pegawai Lembaga.

Relevansi :

Relevansi atau dalam arti lain persamaan antara dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang evaluasi yang pada Lembaga rehabilitasi sosial, sehingga mampu menjadi modal bagi penulis penelitian ini bagaimana penelitian evaluasi itu dilakukan, dengan melihat juga aspek-aspek pada Lembaga rehabilitasi sosial.

2) Judul dan Penulis :

Oman Sukmana, 2020, “Program Peningkatan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas Netra”

Hasil Penelitian :

Hasil dari penelitian ini adalah berupa keberhasilan program dan evaluasinya. Dimana pada penelitian ini membahas tentang keberhasilan program, dari program bimbingan dan mental, program bimbingan sosial dan program bimbingan usaha(kerja), yang dinilai dari 3 aspek yaitu baik, cukup dan kurang. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas bagaimana program ini diimplementasikan di RSBN untuk menunjang peningkatan keterampilan bagi penyandang disabilitas Netra di RSBN Malang tersebut.

Relevansi :

Relevansi penelitian yang berjudul “Program Peningkatan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas Netra” dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana implementasi program, terutama juga melihat program-program tersebut berkonsep dari dinas sosial Jawa Timur, selanjutnya dikembangkan oleh RSBN. Selain itu didalam penelitian ini juga membahas evaluasi program yang dimana memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini.

3) Judul dan Penulis :

Yuda Aswidiyanto Soerdjawanto, 2020, “Peran Instruktur dalam Pelatihan Keterampilan Sulam di Balai Pelayanan dan rehabilitasi Sosial PMKS(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” Sidoarjo

Hasil Penelitian :

Hasil dari penelitian ini adalah berupa keberhasilan program dan evaluasinya. Dimana pada penelitian ini membahas tentang keberhasilan program, dari program bimbingan dan mental, program bimbingan sosial dan program bimbingan usaha(kerja), yang dinilai dari 3 aspek yaitu baik, cukup dan kurang. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas bagaimana program ini diimplementasikan di RSBN untuk menunjang peningkatan keterampilan bagi penyandang disabilitas Netra di RSBN Malang tersebut.

Relevansi :

Pada penelitian ini menghasilkan tentang bagaimana peran tokoh-tokoh atau SDM didalamnya, terutama para pembimbing, pelatih, fasilitator, motivator dalam ketrampilan menyulam, dan juga melihat faktor penghambat dan pendukung yang mana untuk mendukung kegiatan asah ketrampilan ini melalui menyulam. Tentang bagaimana kegiatan menyulam ini mampu membawa pengaruh kepada

4) Judul dan Penulis :

Ufaira Nabila,2020 “Peran Instruktur dalam Pelatihan Keterampilan Sulam Di Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Pmks Sidoarjo

Hasil Penelitian :

Hasil dari penelitian ini didapatkan tentang bagaimana terapi mental spiritual mempengaruhi klien, didapatkan sebesar 29,6% bahwa terapi tersebut mampu mempengaruhi kesadaran beraga klien dan sisanya yaitu 70,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variable yang lainnya.

Relevansi :

Relevansi penelitian dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama memiliki program dalam bidang agama, sehingga mampu menjadi rujukan untuk UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan nantinya mengembangkan program-programnya.

5) Judul dan Penulis :

Eltiga Angga Putra Sihombing, 2020, "Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Di Pulau Jawa

Hasil Penelitian :

Dalam penelitian ini, yaitu melalui analisis data sekunder 5 tempat Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa yaitu (BRSBK) ataua Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya di Sidomulyo Jakarta, BRS Mardi Utomo Semarang, Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang, Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan Pengemis (BRSEGP) Pangudi Luhur Bekasi dan Panti

Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua Bandung Barat melihat bahwasanya program kerja yang dilakukan relative sama dari proses pendekatan awal sampai pada tahap terminasi. Ditemukan beberapa faktor penghambat dan pendorong didalamnya.

Relevansi :

Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada temanya yaitu rehabilitasi sosial, pada penelitian ini juga membahas tentang rehabilitasi sosial yang dimana kliennya juga seorang gelandangan dan pengemis, selain itu Lembaga juga diambil dari yang daerah yang sama yaitu Pulau Jawa. Pada penelitian ini membahas juga tentang faktor penghambat dan pendorong yang merupakan juga bagian dari evaluasi,

6) Judul dan Penulis :

Maria Ratu Mirna dan Endang Indartuti, 2021, Manajemen Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Anak Jalnan di Dinas Sosial Kota Surabaya”

Hasil Penelitian :

Hasil dari penelitian ini adalah dalam manajemen layanan rehabilitasi sosial pada aspek program yang ada sudah berjalan dengan baik dan sudah bisa dikatakan optimal. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa keberhasilan itu dapat dilihat dari kontribusi anak-anak jalanan terhadap program dan perubahan perilaku terhadap norma-norma sosial lebih baik, selain itu kepribadiannya juga lebih baik, mereka dapat

mengaktualisasikan diri, yang awalnya tertutup menjadi lebih terbuka, serta kemampuan dalam membuka usaha.

Relevansi :

Sama-sama meneliti tentang program dari dinas sosial Jawa Timur dan selain itu klien yang sama yaitu gelandangan di Jawa Timur, yang menjelaskan juga tentang bagaimana program-program itu memberikan perubahan dan dilaksanakan.

7) Judul dan Penulis :

Maryatun, Santoso Tri Raharjo, dan Budi Muhammad Taftazani, 2022, “Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti Untuk Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosiak (PPKS) (Studi pada Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Mardi Utomo Semarang)

Hasil Penelitian :

Hasil dari penelitian ini yaitu didapatkan faktor penghambat dan pendukung kebijakan dalam pelaksanaan penanganan gelandangan berbasis panti ini, diantaranya yang pertama adalah faktor penghambat yaitu keterbatasan tenaga kerja, belum adanya instrument assessment yang seragam dalam setiap tahapan pelayanan kepada PPKS, kurang proaktifnya beberapa pihak pemerintah, kurang maksimalnya Upaya pembinaan dan monitoring, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana. Selain itu juga Faktor pendukung diantaranya adalah adanya

dukungan inovasi dalam meningkatkan layanan, adanya penguatan jejaring dan konsisi geofrafis untuk pengembangan wisata serta Kerjasama yang bai kantar petugas.

Relevansi :

Untuk Relevansinya sendiri dalam penelitian ini membhassa tentang faktor penghambat dan pendukung yang secara tersirat juga menjelaskan bagaimana pengelolaan panti terhadap gelandang itu, Dan juga bisa menjadi sumber referensi untuk mengevaluasi dan rekomendasi program-program yang ada di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan ini untuk lebih baik lagi.

8) Judul dan Penulis :

Vania Cyntia dan Rahmadani Yusran, 2021, “Evaluasi Program Desaku Menanti dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang”

Hasil Penelitian :

Dalam penelitian ini menghasilkan penjabaran tentang bagaimana program-program disana dilaksanakan, termasuk sebelum masuk ke desaku menanti, yaitu diawali dengan bimbingan fisik mental dan sosial, yang kedua adalah pelaksanaan pelatihan keterampilan, ketiga pemberian UEP atau bantuan usaha ekonomi produktif dan jadup, yang terakhir adalah bantuan bahan baku rumah, dalam pelaksanaannya diberikan rumah yaitu berada didesaku menanti, yang diberi waktu selama 5 tahun untuk mengembangkan usaha sehingga kedepannya

bisa mempunyai rumah sendiri. Evaluasi program desaku menanti ini adalah belum optimal karena adanya beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran maka dari itu dalam pelatihan keterampilan juga terbatas, keterbatasan SDM yaitu hanya 1 PSM yang bekerja mengawasi, hal ini menyebabkan beberapa rumah terlihat kosong dikarenakan kurangnya pengawasan.

Relevansi :

Dalam penelitian ini relevansinya yaitu sama-sama memiliki program desaku menanti pada UPT rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan selain itu juga memuat tentang evaluasi terhadap program tersebut namun perbedaannya program ini dilakukan didaerah Padang sedangkan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya yang akan diteliti ini berada di Jawa Timur.

B. Evaluasi

1. Definisi Evaluasi

(Michael Scriven, 2004 : 5-16) adalah seorang tokoh ilmu evaluasi, ia mengkaji kurang lebih enam puluh pendapat para ahli yang menjelaskan tentang definisi dari kata “evaluasi” ini. Antara lain beberapa istilah dari evaluasi adalah sebuah *analyze, appraise, score, review, adjuge, rank, examine, study, inspect*, yang mana artinya adalah menganalisis, menilai, mengulas, memutuskan, menggolongkan, memeriksa, mempelajari, memeriksa. Ada 2 pendapat dari Michael Scriven dalam (Scriven,1976) dan Joint Committee on Standart for

Educational Evaluation yang dimana keduanya asama-sama menjelaskan bahwa evaluasi adalah prospek untuk menilai nilai maupun manfaat suatu hal, objek maupun subjek dengan sistematis. Ahli lain mengartikan bahwasanya evaluasi bukan hanya proses menilai, namun juga tindakan untuk menentukan nilai tersebut, dalam arti lain evaluasi juga mengatur bagaimana suatu objek tersebut dapat berjalan, yang diharapkan adalah lebih baik.

Sanders, Worthen dan Fitzpatrick menambahkan dalam (Sanders, Worthen & Fitzpatrick, 2004:5) bahwa evaluasi adalah Langkah-langkah dan menentukan arah suatu objek kedepannya, didalam evaluasi terdapat suatu proses identifikasi, klarifikasi dan aplikasi kriteria yang kuat untuk menentukan nilai hasilnya, berdasarkan proses-proses tersebut maka dijabarkan bahwa proses evaluasi meliputi hal-hal berikut ini :

- a. Membuat standar untuk menilai bagaimana kualitas, selain itu juga memutuskan dan menetapkan dari adanya standar tersebut apakah sudah bersifat absolut atau relative.
- b. Mengumpulkan informasi yang sesuai atau relevan, informasi ini dijadikan acuan untuk strategi-strategi implementasinya.
- c. Yang terakhir adalah menerapkan standar-standar yang telah dibuat sebelumnya, dan diimplementasikan dengan memperhatikan informasi-informasi yang didapat tersebut.

Langkah-langkah yang telah dijabarkan di atas menjadi penentu atau arah bagaimana hasil dari evaluasi tersebut, karena dari evaluasi yang ada akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bisa dijadikan pedoman dalam memperbaiki suatu objek tersebut, juga mengoptimalkan dan meningkatkannya kualitas keberhasilannya.

Evaluasi program adalah aktivitas menganalisis yang teratur secara sistematis yang berkenaan dengan sesuatu yang berguna, berharga ataupun bermakna pada suatu objek atau implementasi rencana. (Denzin & Lincoln, 2000:83) mengemukakan bahwasanya penyebab bagian program yang manakah yang telah mencapai tujuan, melihat juga program yang belum mencapai tujuan bagaimanakah problematika didalamnya. Dari aspek-aspek tersebut menjadi penentu indicator-indikator kerja ataupun pendataan performa pada setiap bagian tahapannya. Melihat dari uraian di atas maka dari itu bisa dikatakan evaluasi program merupakan sebuah proses. Yang dibagi menjadi dua sudut pandang yaitu secara implisit dan eksplisit. Dalam sudut pandang implisit evaluasi harus membandingkan dengan apa yang program itu capai dengan apa yang seharusnya program itu capai, untuk sudut pandang secara eksplisit yaitu hanya mengacu pada pencapaian pada tujuan saja. Dari program tersebut juga memiliki poin dimana adanya

kriteria ataupun indikator keberhasilan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, hal ini menjadi penentu keputusan apakah sebuah program akan ditingkatkan, ditunda, dihentikan, dikembangkan, diinovasi, ditambahi, diterima ataupun ditolak, hal itu semata-mata adalah untuk tujuan perbaikan,.

2. Model Evaluasi

Studi evaluasi mulai berkembang dari tahun 1949, namun perkembangannya lebih sederhana dan belum sekompleks saat ini. Model evaluasi pertama dikembangkan oleh Tyler, dalam penelitiannya model tersebut dinamakan dikenal dengan istilah model evaluasi *black box*. Dalam buku *Basic Principles of Curriculum and Instructional*, model evaluasi *black box*, nama tersebut berasal dari evaluasi yang dilakukan tidak berdasarkan proses, namun melihat validitas dan reliabilitas, diartikan juga sebagai model yang berfokus pada perilaku baik pada tahap awal dan juga tujuan, subjek yang digunakan oleh Tyler saat itu adalah peserta didik, selain itu Tyler juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, dan yang menjadi faktornya saat itu adalah kurikulum Pendidikan. Jadi bisa dikatakan evaluasi saat itu memfokuskan pada perubahan sikap atau perilaku itu. Kesimpulan dari model evaluasi Tyler adalah menitik beratkan kepada hasil akhir yang dimana kurang memperhatikan dari segi proses.

Model evaluasi *black box* tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Model ini tidak bisa dilihat hanya dari aspek

kekurangannya saja, karena awal mula studi evaluasi yaitu berasal dari evaluasi Tyler ini, atau pelopor studi evaluasi ini. Untuk sisi kekurangannya jelas terlihat bahwasanya evaluasi ini tidak memandang pada aspek proses, yang dimana aspek tersebut penting, karena melihat bagaimana implementasi lapangan itu harus. Sisi kelebihanya sendiri yaitu sederhana, dimana artinya model ini lebih mudah untuk diaplikasikan. Sedangkan untuk aspek kelebihan yang kedua adalah dari keserhanaan yang ada tersebut aspek ini juga melihat pada aspek pembelajaran, yang dimana mampu mendatangkan pengalaman baik dan buruk untuk perbaikan kedepannya.

Model *black box* ini kurang lebih berjalan 10 tahun, pada tahun-tahun ini orang-orang banyak menggunakan studi evaluasi yang bentuknya psikometrik yaitu dalam bentuk pengukuran dan tes. Fokus utama dari evaluasi ini yaitu pada sudut hasil, yang tidak kompleks juga pada prosesnya juga seperti saat ini, sehingga pada tahun-tahun ini juga studi evaluasi kurang menarik perhatian karena kurang memiliki nilai-nilai praktis atau berguna. Selanjutnya, pada tahun berikutnya yaitu 1960-an studi evaluasi mulai berinovasi kembali, bahkan menjadi salah satu jurusan yang bukan hanya pada jenjang sarjana(S1) namun sampai pada jenjang magister(S2) dan doctor(S3).

Menggiring permasalahan tentang pelopor studi evaluasi sampai saat ini muncul juga model-model evaluasi sebagai bentuk inovasi. Perkembangan evaluasi sampai saat ini adalah bukti bahwa evaluasi

adalah bagian yang urgent dari sebuah proses perbaikan, baik itu untuk suatu program ataupun objek-objek lainnya. Sistematika ataupun bentuk dari evaluasi sendiri berbeda-beda, maka dari itu pengelompokan itu perlu dilakukan, agar hal-hal tersebut lebih detail dan sistematis sesuai dengan tujuan-tujuannya. Ada banyak model evaluasi dari perkembangan hingga saat ini, berikut adalah beberapa penjelasan tentang model-model evaluasi :

a. Model CIPP (Daniel Stufflebean's)

(Stufflebeam, H McKee and B McKee, 2003:118) dalam (Widoyoko, 2009) membagi model evaluasi ini menjadi 4 yang disingkat menjadi CIPP, diantaranya yaitu *context, Input, Process, dan Product*, evaluasi ini mengangkat bagian dari seluruh system, ia mengatakan bahwa tujuan penting dalam evaluasi bukan hanya membuktikan permasalahan didalamnya, namun lebih utamanya memperbaiki permasalahan didalamnya.

Ada beberapa istilah evaluasi dalam model ini, diantaranya adalah sebagai

berikut :

- Evaluasi konteks yaitu jenis tahapan evaluasi bertujuan untuk menilai masalah, kebutuhannya, potensi atau asset, serta peluang, Dari beberapa indicator-indikator tersebut membantu pembuat program ataupun kebijakan untuk menentukan prioritas dan tujuannya. Kesimpulannya pada evaluasi ini membahas

tentang penyebab yang mempengaruhi suatu perencanaan pada program-program yang ada.

- Evaluasi masukan, dalam evaluasi ini indicator-indikatornya antara lain menilai alternatif pendekatan (intake), cara melakukan atau bagaimana implementasinya, Sumber daya manusia yang turut aktif berperan didalamnya, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam program tersebut dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaannya sampai dalam mencapai tujuannya, manfaat evaluasi ini adalah untuk melihat alokasi pembiayaan, jadwal pelaksanaan, maupun sumberdaya-sumberdaya lainnya. Kesimpulannya pada evaluasi ini untuk melihat kualitas pendapat ataupun masukan yang dapat memperbaiki serta menunjang ketercapaian program-program yang ada.
- Evaluasi proses yang dimana untuk menilai implementasinya dari rencana-rencana yang sudah dibuat, dalam hal ini membantuk pelaksana kegiatan untuk melihat apa nantinya yang akan dilakukan, tahap-tahap apa sajakah, hal ini juga berguna nantinya untuk mengetahui kinerja program dan memperkirakan hasil yang akan dicapai. Kesimpulannya pada evaluasi ini melihat bagaimana pelaksanaan penggunaan fasilitas, dan perkembangan sumberdaya dengan hal-hal yang sudah direncanakan.

- Yang terakhir adalah evaluasi hasil, pada tahap ini untuk menilai hasil dan mengidentifikasinya, sudah sesuai apa yang diharapkan atau belum, jangka yang diperlukan Panjang atau pendek, sasarannya bukan hanya untuk pelaksana program saja namun juga pengguna lainnya, termasuk pelaksana setelahnya. Sehingga nantinya akan menilai aspek-aspek sampai, keberlanjutan program, efektivitas, maupun daya untuk beradaptasi. Pada evaluasi ini melihat hasil-hasil dan kesesuaian dengan harapan atau rencana hasil yang sudah dibuat sebelumnya (Stufflebeam, 2003) dalam (Widoyoko, 2009)

b. Model Evaluasi Disrepancy Model oleh Provus

Evaluasi ini disebut sebagai evaluasi kesenjangan. Menurut Provus pada (Fernandes, 1984) evaluasi ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian antar standar dengan kesesuaian program kerjanya, apakah sudah baku atau belum. Arti dari kata baku disini adalah indicator ataupun kriteria yang sudah ditetapkan dengan kinerja hasil implementasi suatu program. Beberapa kesenjangan yang dapat menjadi evaluasi suatu program adalah sebagai berikut :

- Kesenjangan antara planning dengan implementasi suatu program, tahap ini memperhatikan ada beberapa kriteria yang sudah ditetapkan, apakah sudah sesuai dengan pelaksanaannya.
- Selanjutnya adalah kesenjangan antara hipotesis-hipotesis yang sudah direncanakan dengan realitas pelaksanaan programnya.

- Poin ketiga adalah kesenjangan antara status kemampuan dengan kemampuan yang ditentukan, jadi disini fokus utamanya hal-hal yang sudah diterapkan dengan pengetahuan atau keterampilan mereka sudah sejauh mana.
- Kesenjangan tujuan, memperhatikan tujuan yang tidak terlalu dibawah standar ataupun sebaliknya, dengan mempertimbangkan kemampuan-kemampuannya tadi
- Yang ke-lima adalah kesenjangan tentang program-program yang dapat diubah, apabila program tersebut tidak sesuai dengan hal-hal yang diharapkan atau sekiranya butuh perbaikan didalamnya maka program tersebut harus diubah.
- Yang terakhir adalah kesenjangan dalam suatu *system* yang tidak konsisten, artinya disini program-program yang sudah ditetapkan tidak berjalan dengan baik, mengalami penurunan yang lebih mudah daripada kenaikan keberhasilannya, maka dari itu perlu diperbaiki.

Karena adanya beberapa kesenjangan diatas, maka dari itu dalam proses evaluasinya terdapat beberapa indikator diantaranya mengenai desain, proses, instalasi, produk dan yang terakhir adalah membandingkan.

c. Model Evaluasi Empat Level KirkPatrick

(Kirkpatrick, 2006) dalam Romadhon menjabarkan ada tiga alasan spesifik dalam mengimplementasikan evaluasi program. Yaitu

dengan memperlihatkan bagaimana program tersebut berkontribusi pada tujuan dan sasaran organisasi, untuk menentukan apakah suatu program pelatihan dapat berkelanjutan atau tidak, dan yang terakhir untuk memperoleh informasi tentang bagaimana meningkatkan program rehabilitasi dimasa datang. Ia mengemukakan empat level evaluasi untuk menjabarkan tiga alasan tersebut, yaitu diantaranya level 1 adalah reaction (reaksi), level 2 learning (pembelajaran), level 3 behavior (perilaku), level 4 results(hasil/dampak).

C. Program

1. Definisi Program

(Owen & Smith, 1989:26) menguraikan bahwa program adalah seperangkat kegiatan yang diimplementasikan untuk menuju perubahan. Dalam definisi ini program memiliki 2 hal yang penting yaitu rencana yang terdokumentasikan dan juga aplikasi berupa Tindakan yang sistematis dengan dokumentasi tersebut yang terangkum dalam sebuah rencana. Sedangkan dalam (Donald B. Yarbrough, 2010) mengungkapkan bahwa program ialah “ *systematic application of resources guided by beliefs, logic and assumptions identifying human needs and factors related to them. Defined completely, a program is :*

- *Using managed resouces*
- *To achieve specified goals*
- *Related to specific needs*
- *In specific contexts*

- *A set of planned systematic activities”*

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwasanya program adalah implementasi dari sumber daya yang nantinya didasarkan pada realitas ataupun logika, asumsi dan juga keyakoinan tentang kebutuhan manusia

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Program berbentuk sistematis sesuai dengan yang direncanakan, baik dari segi sasaran, bentuk program, waktu dan bentuk pelaksanaannya, kriteria keberhasilan, output atau manfaatnya yang jelas, serta berdampak.

2. Evaluasi Program

Evaluasi program adalah sebuah aktivitas untuk menyelidiki yang tersusun secara sistematis yaitu tentang suatu objek yang berharga dan bernilai. Pendapat lain dari (Denzin dan Lincoln, 2008) menjabarkan bahwasanya evaluasi program ini membahas tentang program manakah yang telah mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dari Keputusan-keputusan tersebut maka munculah suatu indikator penilaian kinerja pada setiap tahap yaitu rendah, moderat dan tinggi. Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya evaluasi program adalah sebuah proses, yang memerlukan strategi, waktu, maupun sub-sub lain yang mendorongnya. Terdapat 2 pernyataan lainnya juga, yang dimana evaluasi dapat diartikan secara eksplisit dan implisit. Secara implisit sendiri evaluasi harus membandingkan apa

yang telah dicapai dengan program apa saja yang seharusnya dicapai berdasarkan standar-standar yang ditetapkan. Sedangkan secara eksplisit berarti evaluasi membahas tentang pencapaian tujuan. Dan dalam konteks pelaksanaan program, kriteria yang dimaksud adalah kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan akan menilai hasil dan prosesnya yang dimana bisa dijadikan acuan pengambilan keputusan. Yaitu Keputusan program akan ditingkatkan, diteruskan, diterima, ditolak maupun ditunda. (Muryadi, 2017)

D. Rehabilitasi Sosial

1. Definisi Rehabilitasi Sosial

Suparlan menguraikan tentang rehabilitasi adalah suatu proses untuk mengembangkan dan memperbaiki kembali baik dari segi fisik, mental, maupun hal-hal lainnya, termasuk sosialnya. Rehabilitasi bertujuan untuk membantu untuk mencapai kesejahteraan sosial. Selain itu ahli lain juga mengungkapkan dalam Barjayang mengungkapkan bahwa rehabilitasi adalah suatu program yang mendalam dan luas (*holistic*) dan terpadu atas penyelesaian-penyelesaian fisik, medis, psikososial, dan vokasional yang mampu meningkatkan atau memberdayakan klien-klien rehabilitasi tersebut. Barja juga menambahkan tujuan rehabilitasi adalah mencapai kebermaknaan sosial atau berfungsi sosial dan manusia mampu melakukan interaksi yang lebih baik dengan lingkungan sekitarnya. Departemen sosial juga menguraikan tentang definisi rehabilitasi. Yang dimana ia menjelaskan

bahwa rehabilitasi adalah proses pengembangan dan refungsionalisasi yang memungkinkan untuk penerima rehab untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi sosialnya dalam lingkungan sosialnya. Selain itu juga, menurut kamus kedokteran Dorland edisi 29 tentang pengertian rehabilitasi, rehabilitasi adalah suatu pemulihan kedalam bentuk yang lebih baik. (Nur'aini, 2022)

Rehabilitasi sosial (Carolina, 2004:185) adalah proses pemulihan yang dimana mengupayakan agar klien (penerima proses rehabilitasi) untuk memperbaiki kembali fungsi-fungsi sosialnya di lingkungan masyarakatnya. Pada prosesnya rehabilitasi sosial juga memerlukan dukungan-dukungan yang baik baik itu dari pihak keluarga, Masyarakat maupun sebuah komunitas, selain itu juga memerlukan dukungan dari pekerja sosial dan psikolog pada proses-proses rehabilitasi ini. (Nur'aini, 2022)

E. Lembaga Negara

Lembaga negara pada kepustakaan Belanda dikenal sebagai "*staat organen*" yaitu suatu organisasi dalam sebuah negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri istilah "Lembaga" sendiri terdiri atas ikatan, bentuk, asal mula dan juga organisasi atau bada yang tujuannya melakukan suatu analisis ataupun penyelidikan terhadap ilmu namun tidak hanya itu Lembaga juga melakukan sebuah usaha yang dimana didalamnya terdapat ketua beserta jajaran-jajaran lainnya (struktur organisasi) untuk menangani suatu permasalahan atau mencapai tujuan-tujuan tertentu juga. Dalam

Wikipedia disebutkan bahwa Lembaga negara disebut sebagai “civital organization” atau Lembaga pemerintahan yang tujuannya untuk negara itu sendiri baik itu dalam penyelenggaraan sampai Pembangunan. Apabila melihat dari definisi-definisi tersebut pada intinya Lembaga negara sendiri adalah sebuah organisasi atau badan yang dibuat, didukung, disetujui oleh negara, yang tujuannya nantinya juga akan kembali pada negara.

Sedangkan beberapa pendapat Dewi Oktaviani yang menyebutkan bahwa Lembaga negara yaitu Lembaga pemerintahan yang dimana dari segi kedudukan, fungsi dan kewenangannya secara tegas suda teratur pada Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dimaknai sebagai institusi-institusi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan dan menjalankan fungsi suatu negara. Lembaga negara sendiri juga membentuk Lembaga sosial yang dimana fungsinya adalah untuk menangani permasalahan atau keresahan-keresahan sosial yang dihadapi oleh negara. (Janpatar, n.d.)

Tertera pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 110 Tahun 2021 bahwasanya dibentuklah Kemensos yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang sosial guna membantu presiden dalam menyelenggarakan suatu negara. Selain itu juga, pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2016 Bab II Pasal 2 juga dibentuklah Lembaga sosial yaitu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang dimana Sebagian tugasnya adalah menangani PMKS(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Provinsi Jawa Timur. PMKS atau Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial sendiri sampai saat ini terbagi menjadi 26 permasalahan yang ada di Indonesia. Diantaranya yaitu anak balita terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan(anjal), anak yang membutuhkan perlindungan khusus, lansia atau lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tunasusila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, penyandang HIV/AIDS, korban penyalahgunaan narkoba(NAPZA), *human trafficking*, anak jalanan, korban tindak kekerasan, Perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah, sosial psikologis, komunitas adat terpencil. Melihat banyaknya permasalahan tersebut dan dengan melihat wilayah Jawa Timur yang luas, maka dari itu diperlukan pembagian permasalahan-permasalahan tersebut menjadi subsistem Lembaga sesuai dengan permasalahan dan penanganannya.

F. Gelandangan

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 1980, mengenai definisi gelandangan. Gelandangan adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, menjalani hidup tidak sesuai dengan peraturan atau norma dalam lingkungan Masyarakat, dan orang tersebut tidak memiliki tempat tinggal. Mereka biasanya tinggal di jalanan, dan banyak ditemui di kota-kota besar. Dalam KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia) norma adalah peraturan yang ada pada suatu lingkungan Masyarakat yang sudah menjadi pedoman didalam bersikap ataupun berperilaku. Oleh karena itu gelandangan dianggap sebagai

permasalahan sosial karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku pada Masyarakat. Dikutip dari (Soerjono:2006) menjelaskan bahwasanya Permasalahan sosial adalah permasalahan yang ada dalam lingkup Masyarakat yang dimana berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial didalamnya.

Disebutkan oleh pemahaman teoritis disebutkan oleh (Manangin, 2010:23) gelandangan dan pengemis ini biasa disebut “gepeng” pada sebutan negara Indonesia, 2 hal ini sebenarnya adalah hal yang berbeda. Dimana pengemis sendiri biasanya masih memiliki tempat tinggal sedangkan gelandangan tidak. Mengulas tentang gelandangan, gelandangan ini masuk dalam orang-orang lemah dan tidak mampu. Ketidakmampuan itu bukan hanya dilihat dari ketidakmampuan ekonomi, namun juga kepada aspek cara mereka untuk mengembangkan potensinya. Maka dari itu juga, ini perlu menjadi perhatian negara untuk mengentaskannya. Negara sendiri juga telah membuat Undang-undang dimana gelandangan sendiri masuk dalam konteks tersebut, disebutkan dalam UU 1945 pasal 34 ayat (1) dan (2) bahwasanya pada ayat (1) disebutkan , *“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”*, pada ayat (2) sendiri disebutkan juga bahwasanya *“negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan memberdayakan Masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”*.(Al-Anba, 2020)